

Dari Edukasi ke Aksi: Eco Bhinneka sebagai model pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi lintas iman untuk keberlanjutan lingkungan

¹Uswatun Hasanah*, ²Ana Utami Zainal, ³Lufki Nurlaila Hidayati, ³Lia Karisma Saraswati, ³Isnatul Chasanah, ³Windarti, ³Hanifa Kasih Surahman, ⁴Ariati Dina Puspitasari

¹Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

²Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Prof Dr Hamka, Jakarta, Indonesia

³Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah, Jakarta, Indonesia

⁴Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding Author

Jl. Kh Ahmad Dahlan, Banyumas, Jawa Tengah, (0281) 637239

E-mail: uhasanah1709@ump.ac.id

How to cite (APA 7th style): Hasanah, U., Zainal, A. U., Hidayati, L. N., Saraswati, L. K., Chasanah, I., Windarti, W., Surahman, H. K., & Puspitasari, A. D. (2026). Dari Edukasi ke Aksi: Eco Bhinneka sebagai model pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi lintas iman untuk keberlanjutan lingkungan. *Community Empowerment Journal*, 4(1), 24-41. <https://doi.org/10.61251/cej.v4i1.350>

Abstrak

Krisis ekologis global dan meningkatnya polarisasi sosial menuntut pendekatan pengabdian masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada solusi teknis, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan nilai keberlanjutan. Artikel ini bertujuan menganalisis dampak Program Eco Bhinneka sebagai model pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi lintas iman dan lingkungan di lima wilayah dampingan: Banjarmasin, Bandung, Jakarta Timur, Jambi, dan Banyumas. Program ini menggunakan pendekatan *community-based participatory approach* yang mengintegrasikan edukasi lingkungan, aksi kolektif, dan penguatan kepemimpinan perempuan muda. Data dikumpulkan melalui analisis situasi awal, pre-test dan post-test, observasi partisipatif, refleksi peserta, serta monitoring dan evaluasi program. Hasil menunjukkan peningkatan literasi ekologis peserta, perubahan perilaku pro-lingkungan, serta penguatan kohesi sosial lintas iman melalui aksi bersama seperti bank sampah, penghijauan, eco enzyme, budikdamber, dan kampanye digital. Dari perspektif teoretis, program ini mengintegrasikan *environmental peacebuilding*, *faith-based environmentalism*, *transformative learning*, dan ekofeminisme dalam satu praktik pengabdian yang kontekstual dan transformatif. Eco Bhinneka terbukti efektif dalam menghubungkan keberlanjutan ekologis dengan perdamaian sosial serta pemberdayaan perempuan muda. Model ini berpotensi direplikasi sebagai strategi pengabdian masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan dalam konteks multikultural Indonesia.

Kata kunci: environmental peacebuilding; keberlanjutan lingkungan; kolaborasi lintas iman; pengabdian masyarakat; perempuan muda

Abstract

The global ecological crisis and increasing social polarization demand community engagement approaches that move beyond technical solutions and actively strengthen social cohesion and sustainability values. This article analyzes the impact of the Eco Bhinneka Program as a community engagement model based on interfaith collaboration and environmental action across five assisted regions in Indonesia: Banjarmasin, Bandung, East Jakarta, Jambi, and Banyumas. The program adopts a community-based participatory approach that integrates environmental education, collective action, and the empowerment

of young women's leadership. Data were collected through baseline situational analysis, pre- and post-tests, participatory observation, participant reflections, and program monitoring and evaluation. The findings indicate significant improvements in participants' ecological literacy, pro-environmental behavioral changes, and strengthened interfaith social cohesion through collaborative initiatives such as community waste banks, tree planting, eco-enzyme production, small-scale urban aquaculture (budikdamber), and digital environmental campaigns. Theoretically, the program synthesizes environmental peacebuilding, faith-based environmentalism, transformative learning, and ecofeminism into a contextual and transformative model of community engagement. Eco Bhinneka demonstrates that interfaith environmental collaboration can simultaneously promote ecological sustainability, social peace, and young women's empowerment. The model holds strong potential for replication as an inclusive and sustainable community engagement strategy in multicultural contexts such as Indonesia.

Keywords: *community engagement; environmental peacebuilding; interfaith collaboration; sustainability; young women*

PENDAHULUAN

Krisis ekologis global telah berkembang menjadi salah satu tantangan paling mendasar bagi keberlanjutan kehidupan manusia pada abad ke-21. Laporan ilmiah mutakhir menunjukkan bahwa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, pencemaran lingkungan, serta krisis pengelolaan limbah merupakan fenomena yang saling terhubung dan memperkuat kerentanan sosial di berbagai wilayah dunia (IPCC, 2022; UNEP, 2021). Intensifikasi bencana hidrometeorologis seperti banjir, kekeringan, badai, serta tanah longsor tidak hanya merusak ekosistem fisik, tetapi juga berdampak pada ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, migrasi paksa, hingga konflik sosial berbasis sumber daya (WHO, 2021; FAO, 2022). Dengan demikian, krisis ekologis bukan lagi persoalan sektoral, melainkan krisis multidimensional yang menyentuh relasi antara manusia, alam, dan struktur sosial.

Berbagai kajian menegaskan bahwa solusi terhadap krisis ekologis tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan teknis atau kebijakan pemerintah semata, tetapi memerlukan perubahan perilaku kolektif, penguatan solidaritas sosial, dan keterlibatan aktor masyarakat sipil secara aktif (Ostrom, 2015; Berkes, 2017). Pendekatan berbasis komunitas (*community-based environmental management*) terbukti lebih efektif dalam menciptakan keberlanjutan jangka panjang karena mendorong partisipasi warga, memanfaatkan pengetahuan lokal, serta memperkuat rasa kepemilikan terhadap program (Pretty & Smith, 2004; Reed et al., 2018). Dalam konteks ini, peran organisasi masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan komunitas perempuan, menjadi semakin penting.

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap dampak krisis ekologis global. Letak geografis sebagai negara kepulauan tropis, tingginya kepadatan penduduk, serta ketergantungan ekonomi pada sumber daya alam menjadikan Indonesia menghadapi risiko ekologis yang kompleks (Bappenas, 2020). Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana menunjukkan peningkatan signifikan kejadian bencana hidrometeorologis dalam satu dekade terakhir, terutama banjir dan tanah longsor (BNPB, 2021). Selain itu, Indonesia juga menghadapi krisis pengelolaan sampah yang serius, dengan produksi sampah nasional mencapai jutaan ton per tahun dan kapasitas pengolahan yang belum memadai (KLHK, 2022; Suryani et al., 2021).

Di wilayah perkotaan, persoalan ini diperparah oleh urbanisasi cepat, keterbatasan ruang terbuka hijau, serta meningkatnya ketergantungan pada sistem pangan eksternal. Studi menunjukkan bahwa ketahanan pangan rumah tangga perkotaan semakin rentan akibat perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan (Purwanto & Nugroho, 2019; FAO, 2022). Sementara itu, di

wilayah perdesaan dan penyangga kota, alih fungsi lahan pertanian dan hutan menjadi kawasan permukiman atau industri menyebabkan degradasi tanah, penurunan daya serap air, dan meningkatnya risiko longsor (Sutrisno et al., 2020; BNPB, 2021). Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan ekologis di Indonesia bersifat struktural, berkaitan erat dengan pola pembangunan dan tata kelola sumber daya.

Dalam situasi tersebut, pendekatan pengabdian masyarakat memiliki peran strategis sebagai jembatan antara pengetahuan ilmiah, kebijakan publik, dan praktik komunitas. Namun, praktik pengabdian masyarakat di bidang lingkungan masih sering bersifat teknis dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi sosial-budaya yang kompleks, termasuk keberagaman agama dan relasi antar kelompok sosial (Hidayat & Suryana, 2020; Lestari & Subekti, 2020). Padahal, Indonesia merupakan masyarakat multikultural dan multireligius, di mana agama memiliki peran signifikan dalam membentuk nilai, norma, dan perilaku sosial.

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa *faith-based organizations* (FBOs) memiliki kapasitas besar dalam mendorong perubahan sosial dan perilaku pro-lingkungan karena memiliki legitimasi moral, jaringan komunitas, serta kemampuan meringkai isu lingkungan dalam bahasa etika dan spiritual (Muzakki et al., 2025; Tomalin, 2015; Mangunjaya & McKay, 2019; Veldman et al., 2018). Dalam konteks Islam, nilai-nilai seperti *khalifah fil ardh* (manusia sebagai penjaga bumi), *amanah*, dan larangan *fasad* (kerusakan) menjadi dasar normatif bagi tanggung jawab ekologis (Foltz, 2016; Mangunjaya, 2019). Pendekatan berbasis nilai agama terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran ekologis karena menyentuh dimensi moral dan identitas masyarakat (Taylor et al., 2016). Namun demikian, praktik kolaborasi lintas iman dalam aksi lingkungan masih relatif terbatas. Studi tentang dialog antaragama menunjukkan bahwa interaksi lintas iman sering berhenti pada level wacana teologis dan belum banyak berkembang menjadi aksi sosial bersama (PUSAD, 2021; Putnam & Campbell, 2017). Padahal, isu lingkungan dapat menjadi ruang persamaan yang aman dan inklusif karena menyentuh kepentingan bersama tanpa memicu polarisasi identitas (Krampe et al., 2021). Kolaborasi lintas iman berbasis aksi ekologis berpotensi memperkuat kohesi sosial sekaligus memperluas jangkauan dampak lingkungan (Gorski & Altinordu, 2008; McCright et al., 2016).

Perempuan memiliki posisi strategis dalam pengelolaan lingkungan sehari-hari. Perempuan sering menjadi pengelola utama konsumsi rumah tangga, pengelolaan sampah, serta pendidikan nilai lingkungan bagi anak-anak (UN Women, 2020). Namun, kontribusi ini sering kali tidak diakui secara struktural dan masih dipandang sebagai tanggung jawab domestik (Siegel, 2024). Perspektif ekofeminisme menyoroti bahwa perempuan tidak hanya menjadi kelompok yang paling terdampak oleh kerusakan lingkungan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai agen perubahan ekologis karena kedekatannya dengan praktik perawatan (*care*) dan keberlanjutan kehidupan (Gaard, 2015; Salleh, 2017). Pendekatan *care ethics* menekankan pentingnya relasi, empati, dan tanggung jawab kolektif terhadap kehidupan sebagai fondasi etika sosial (Held, 2006; Tronto, 2013). Dalam konteks masyarakat Indonesia yang berbasis nilai kekeluargaan dan religiusitas, etika kepedulian ini sejalan dengan ajaran agama tentang kasih sayang, gotong royong, dan amanah. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa perempuan sering menjadi penggerak utama inisiatif lingkungan di tingkat komunitas, meskipun dengan sumber daya terbatas (Situmorang, 2020; Azizah & Salsabila, 2022). Oleh karena itu, penguatan kapasitas perempuan muda dalam isu lingkungan tidak hanya relevan secara ekologis, tetapi juga penting secara sosial dan kultural.

Analisis situasi lapangan sebelum pelaksanaan Program Eco Bhinneka Nasyiatul Aisyiyah di lima wilayah dampingan menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran ekologis individu dan aksi kolektif terorganisir. Hasil observasi awal, diskusi mitra, serta telaah dokumen lokal memperlihatkan bahwa isu lingkungan telah lama dirasakan masyarakat, tetapi belum terwadahi

dalam gerakan kolaboratif lintas kelompok. Di Bandung dan Jakarta Timur, persoalan sampah dan keterbatasan ruang hijau menjadi isu dominan. Di Banyumas dan Jambi, persoalan alih fungsi lahan, banjir, dan longsor menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan dan keberlanjutan hidup. Di Banjarmasin, rendahnya literasi lingkungan di kalangan anak muda dan minimnya inovasi pendidikan lingkungan menjadi perhatian.

Selain persoalan ekologis, relasi lintas iman di wilayah tersebut berjalan pasif. Interaksi sosial antaragama memang ada, tetapi belum diarahkan pada kerja sama konkret dalam isu lingkungan (Muzakki et al., 2025). Perempuan muda kader Nasyiatul Aisyiyah menyatakan kegelisahan serupa: mereka menyadari dampak kerusakan lingkungan, tetapi belum memiliki model gerakan, kapasitas kepemimpinan, dan jejaring lintas iman yang memungkinkan mereka berperan lebih strategis. Situasi ini menunjukkan perlunya model pengabdian masyarakat yang tidak hanya meningkatkan literasi lingkungan, tetapi juga membangun kepemimpinan perempuan muda dan jejaring sosial lintas iman.

Program Eco Bhinneka Nasyiatul Aisyiyah dirancang untuk menjawab kesenjangan tersebut melalui pendekatan pengabdian masyarakat yang integratif. Program ini menggabungkan edukasi lingkungan, nilai keislaman tentang amanah ekologis, serta kolaborasi lintas iman dalam satu kerangka aksi partisipatif (Hasanah, 2024). Melalui Training of Trainers (ToT), pelatihan tematik, masifikasi program, serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), Eco Bhinneka mendorong transformasi dari edukasi menuju aksi nyata di tingkat komunitas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *participatory development* yang menekankan keberlanjutan, kepemilikan lokal, dan dampak sosial jangka panjang (Banks et al., 2017; Chambers, 2017).

Urgensi program ini semakin relevan dalam konteks meningkatnya polarisasi sosial dan tantangan kohesi sosial di masyarakat multikultural. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi berbasis kepentingan bersama, seperti isu lingkungan, dapat membangun kepercayaan antar kelompok dan mengurangi prasangka (Allport, 1954; Pettigrew & Tropp, 2006). Dengan menjadikan lingkungan sebagai ruang pertemuan, Eco Bhinneka berupaya mengubah dialog lintas iman dari sekadar wacana menjadi aksi kolaboratif yang membangun solidaritas. Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis dampak Program Eco Bhinneka sebagai model pengabdian masyarakat berbasis kolaborasi lintas iman dan lingkungan. Secara khusus, artikel ini mengkaji perubahan pengetahuan, sikap, dan praktik ekologis peserta; penguatan peran perempuan muda sebagai agen perubahan; serta peningkatan kohesi sosial lintas iman di lima daerah dampingan. Dengan demikian, artikel ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan literatur pengabdian masyarakat dan menawarkan model praktik baik yang dapat direplikasi dalam konteks multikultural lainnya.

METODE

Program pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini dirancang dan diimplementasikan menggunakan pendekatan *community-based participatory approach* (CBPA). Pendekatan ini dipilih karena menempatkan komunitas sebagai aktor utama dalam keseluruhan proses perubahan sosial, bukan sekadar sebagai penerima manfaat intervensi. CBPA menekankan prinsip kolaborasi setara antara akademisi, organisasi masyarakat, dan warga lokal dalam mengidentifikasi masalah, merancang solusi, melaksanakan program, serta mengevaluasi hasilnya (Banks et al., 2017; Jagosh et al., 2015). Dalam konteks program Eco Bhinneka, pendekatan ini menjadi relevan karena tujuan utama program bukan hanya meningkatkan literasi lingkungan, tetapi juga mendorong transformasi sosial melalui penguatan kolaborasi lintas iman dan kepemimpinan perempuan muda.

Secara konseptual, pendekatan partisipatif dalam pengabdian masyarakat terbukti efektif dalam menciptakan keberlanjutan dan rasa kepemilikan terhadap program, karena masyarakat

dilibatkan sejak tahap awal perencanaan (Reed et al., 2018). Model ini juga sejalan dengan kerangka *participatory development* yang menekankan bahwa pembangunan sosial yang berkelanjutan hanya dapat terjadi apabila komunitas memiliki kapasitas, akses informasi, dan ruang untuk menentukan arah perubahan mereka sendiri (Chambers, 2017). Dalam implementasinya, pendekatan partisipatif Eco Bhinneka dipadukan dengan kerangka *faith-based community engagement*, yaitu pendekatan penguatan aksi sosial yang bersandar pada nilai-nilai agama sebagai sumber etika, motivasi, dan solidaritas sosial (Tomalin, 2015; Mangunjaya & McKay, 2019). Integrasi kedua pendekatan tersebut memungkinkan program tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat multikultural.

Metode pelaksanaan PkM ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Ketiga tahapan tersebut dirancang secara sistematis dan saling terintegrasi untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan relevan dengan konteks lokal, partisipatif, serta memiliki dampak yang terukur (Ahmed et al, 2025). Tahap persiapan merupakan fondasi metodologis yang menentukan arah dan kualitas pelaksanaan program. Pada tahap ini dilakukan analisis situasi komprehensif di lima wilayah dampingan, yakni Banjarmasin, Bandung, Jakarta Timur, Jambi, dan Banyumas. Analisis situasi bertujuan untuk memetakan kondisi ekologis, dinamika sosial, serta potensi kolaborasi lintas iman yang tersedia di masing-masing wilayah. Proses analisis dilakukan melalui kombinasi observasi partisipatif, diskusi kelompok terarah (FGD), wawancara semi-terstruktur, serta telaah dokumen dan data sekunder. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami praktik pengelolaan lingkungan yang telah berjalan serta pola interaksi sosial masyarakat dalam konteks sehari-hari (Spradley, 2016). Observasi ini tidak hanya berfokus pada kondisi fisik lingkungan, tetapi juga pada pola kepemimpinan lokal, keterlibatan perempuan muda, serta ruang-ruang dialog antar komunitas.

Diskusi kelompok terarah dilakukan bersama kader perempuan muda Nasyyiatul Aisyiyah dan mitra komunitas untuk menggali persepsi, kebutuhan, dan harapan mereka terhadap program yang akan dilaksanakan. Metode FGD dipilih karena memungkinkan eksplorasi persepsi kolektif dan dinamika interaksi kelompok dalam waktu yang relatif singkat (Krueger & Casey, 2015). Selain itu, wawancara semi-terstruktur dengan tokoh komunitas dan perwakilan lintas iman dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam potensi dan hambatan kolaborasi lintas agama dalam isu lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti dan tim PkM memperoleh narasi kontekstual mengenai kondisi sosial dan relasi antar kelompok di wilayah dampingan (Creswell & Poth, 2018).

Telaah dokumen dan data sekunder dilakukan untuk memperkuat analisis situasi dengan informasi objektif mengenai kondisi geografis, demografis, serta indikator lingkungan setempat, seperti data produksi sampah, luas ruang hijau, atau frekuensi kejadian bencana ekologis (Bappenas, 2020; KLHK, 2022). Integrasi antara data kualitatif dan data sekunder ini memungkinkan penyusunan desain program yang berbasis bukti (*evidence-based planning*). Hasil analisis situasi menunjukkan bahwa meskipun masyarakat memiliki kesadaran terhadap persoalan lingkungan, aksi kolektif yang terorganisir masih terbatas dan kolaborasi lintas iman belum difasilitasi secara sistematis. Temuan ini mempertegas urgensi intervensi yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial dan dialogis.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, tahap berikutnya adalah perumusan desain program secara partisipatif bersama mitra wilayah. Perencanaan partisipatif dilakukan untuk memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan lokal serta meningkatkan komitmen komunitas terhadap pelaksanaan program (Reed et al., 2018). Pada tahap ini disusun modul pelatihan, instrumen evaluasi, serta pedoman penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL). Instrumen pre-test dan post-

test dikembangkan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan sikap peserta terkait isu lingkungan dan kolaborasi lintas iman. Validitas isi instrumen diuji melalui diskusi pakar dan uji coba terbatas di salah satu wilayah sebelum diterapkan secara luas. Sebelum implementasi kegiatan di tingkat komunitas, dilakukan Training of Trainers (ToT) bagi kader inti sebagai fasilitator wilayah. ToT ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas fasilitator dalam mengelola pembelajaran partisipatif, memoderasi dialog lintas iman, serta mengintegrasikan nilai keislaman dalam edukasi lingkungan. Pendekatan pelatihan menggunakan prinsip pembelajaran orang dewasa (*andragogy*), yang menekankan relevansi pengalaman peserta, refleksi kritis, dan orientasi pada pemecahan masalah nyata (Knowles et al., 2015). Selain itu, pendekatan *transformative learning* digunakan untuk mendorong perubahan perspektif peserta melalui refleksi mendalam terhadap pengalaman dan nilai yang mereka anut (Mezirow, 2018).

Tahap pelaksanaan merupakan implementasi konkret dari desain yang telah dirumuskan. Pelaksanaan berlangsung selama enam bulan dan mencakup serangkaian kegiatan pelatihan tematik, aksi lingkungan kolaboratif, masifikasi program, serta penyusunan dan implementasi RTL. Pelatihan tematik mencakup pengelolaan sampah rumah tangga, pembuatan eco enzyme, komposting, budikdamber sebagai strategi ketahanan pangan, penghijauan, serta kampanye digital lingkungan. Metode pembelajaran yang digunakan mengacu pada model *experiential learning*, di mana peserta belajar melalui praktik langsung, refleksi, konseptualisasi, dan aplikasi (Kolb, 2015). Pendekatan ini terbukti meningkatkan retensi pengetahuan dan mendorong perubahan perilaku dibandingkan metode ceramah konvensional.

Ciri khas pelaksanaan program ini adalah integrasi aksi lingkungan dengan kolaborasi lintas iman. Peserta dari latar belakang agama yang berbeda dilibatkan dalam kegiatan bersama seperti penanaman pohon, pengelolaan bank sampah, atau praktik budikdamber. Strategi ini didasarkan pada teori kontak sosial yang menyatakan bahwa interaksi positif dalam konteks kerja sama untuk tujuan bersama dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan kepercayaan antar kelompok (Pettigrew & Tropp, 2006). Dengan menjadikan lingkungan sebagai ruang persamaan, program ini mendorong terbentuknya solidaritas sosial berbasis aksi nyata. Masifikasi program dilakukan melalui replikasi kegiatan oleh fasilitator wilayah di komunitas masing-masing. Setiap peserta diwajibkan menyusun RTL sebagai bentuk komitmen dan indikator keberlanjutan. RTL ini menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana edukasi yang diberikan benar-benar diterjemahkan ke dalam aksi. Prinsip ini sejalan dengan pendekatan pemberdayaan yang menekankan bahwa perubahan sosial terjadi ketika individu memiliki kapasitas dan ruang untuk bertindak (Chambers, 2017).

Pengumpulan data selama tahap pelaksanaan dilakukan secara triangulatif. Data kuantitatif diperoleh melalui pre-test dan post-test yang dianalisis untuk melihat perubahan pengetahuan dan sikap peserta. Data kualitatif diperoleh melalui observasi partisipatif, refleksi tertulis peserta, wawancara singkat, serta dokumentasi kegiatan. Triangulasi metode ini bertujuan meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan (Creswell & Poth, 2018). Selain itu, lembar monitoring dan evaluasi digunakan untuk mencatat jumlah kegiatan, tingkat partisipasi, serta output konkret seperti pembentukan bank sampah atau kegiatan penghijauan.

Tahap evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas program dan menganalisis dampaknya secara komprehensif. Evaluasi mencakup evaluasi proses dan evaluasi dampak. Evaluasi proses menilai kesesuaian pelaksanaan dengan rencana, efektivitas fasilitator, serta tingkat partisipasi peserta. Evaluasi dampak berfokus pada perubahan pengetahuan, sikap, praktik ekologis, serta penguatan relasi lintas iman. Analisis data kuantitatif dilakukan menggunakan statistik deskriptif untuk menghitung persentase peningkatan skor dan tingkat implementasi RTL. Data kualitatif dianalisis menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola perubahan persepsi dan pengalaman peserta (Braun & Clarke, 2019). Melalui pendekatan evaluatif ini, program tidak

hanya dinilai berdasarkan jumlah kegiatan atau peserta, tetapi juga berdasarkan perubahan perilaku dan relasi sosial yang terbentuk. Dengan demikian, metode pelaksanaan Eco Bhinneka dirancang secara komprehensif untuk memastikan bahwa pengabdian masyarakat ini benar-benar menghasilkan transformasi sosial-ekologis yang berkelanjutan dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Output program: Dari transfer pengetahuan ke aksi konkret

Pelaksanaan program Eco Bhinneka di lima wilayah dampingan Banjarmasin, Bandung, Jakarta Timur, Jambi, dan Banyumas menghasilkan berbagai output konkret yang menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat tidak berhenti pada dimensi edukatif semata, melainkan berkembang menjadi praktik sosial-ekologis yang kontekstual, adaptif, dan berkelanjutan. Jika pada tahap awal kegiatan peserta diperkenalkan pada konsep pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, kolaborasi lintas iman, dan nilai keislaman tentang amanah ekologis, maka pada tahap implementasi terlihat jelas bagaimana pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi tindakan nyata di tingkat komunitas. Transformasi dari edukasi menuju aksi ini menjadi indikator penting keberhasilan pendekatan partisipatif yang digunakan dalam program.

Output yang dihasilkan tidak dapat dilepaskan dari analisis situasi awal yang telah dilakukan di masing-masing wilayah. Setiap bentuk aksi yang muncul merupakan respons langsung terhadap kebutuhan lokal yang teridentifikasi sebelumnya. Dengan demikian, output program bukanlah bentuk replikasi model generik, melainkan praktik kontekstual yang tumbuh dari realitas sosial-ekologis setempat. Hal ini sejalan dengan prinsip *community-based participatory approach* yang menekankan bahwa perubahan sosial yang berkelanjutan harus berangkat dari kebutuhan dan aspirasi komunitas itu sendiri (Reed et al., 2018). Dalam konteks ini, Eco Bhinneka memperlihatkan bagaimana desain partisipatif memungkinkan masyarakat menjadi aktor utama dalam menentukan bentuk intervensi yang paling relevan.

Salah satu output paling signifikan adalah pembentukan dan penguatan bank sampah komunitas, terutama di wilayah urban seperti Bandung dan Jakarta Timur. Bank sampah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme teknis pengelolaan limbah domestik, tetapi berkembang menjadi ruang edukasi sosial dan interaksi lintas kelompok. Secara ekologis, bank sampah berkontribusi pada pengurangan volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir serta mendorong praktik pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Studi menunjukkan bahwa inisiatif berbasis komunitas seperti bank sampah memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan kesadaran kolektif terhadap prinsip ekonomi sirkular dan tanggung jawab lingkungan (Dhokhikah et al., 2015; Purba et al., 2021). Namun dalam konteks Eco Bhinneka, bank sampah memiliki dimensi tambahan yang lebih luas: ia menjadi ruang perjumpaan sosial lintas iman. Peserta dari latar belakang Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu terlibat bersama dalam proses pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan sampah. Aktivitas yang tampak teknis ini pada dasarnya menjadi praktik dialog sosial berbasis kerja bersama (Hachmann et al., 2023). Dengan demikian, bank sampah berfungsi sebagai infrastruktur ekologis sekaligus infrastruktur sosial.

Kegiatan penghijauan dan penanaman pohon menjadi output penting di wilayah dengan tingkat kerentanan ekologis tinggi seperti Banyumas dan Banjarmasin. Di Banyumas, kekhawatiran terhadap alih fungsi lahan dan risiko longsor mendorong aksi penanaman pohon sebagai bentuk mitigasi ekologis berbasis komunitas. Sementara di Banjarmasin, penghijauan dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang terdampak oleh pengelolaan sampah dan degradasi ruang terbuka hijau. Literatur menunjukkan bahwa kegiatan penghijauan berbasis komunitas memiliki dampak ganda: meningkatkan kualitas lingkungan fisik sekaligus memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap

ruang publik (Fischer et al., 2017). Dalam program Eco Bhinneka, penanaman pohon bukan sekadar simbolik, tetapi menjadi representasi komitmen jangka panjang terhadap keberlanjutan. Lebih dari itu, keterlibatan kader perempuan muda bersama perwakilan komunitas lintas iman dalam aksi penghijauan memperlihatkan bahwa isu lingkungan dapat menjadi ruang kolaborasi yang melampaui identitas sektarian. Aksi ekologis ini menjadi praktik konkret dari solidaritas sosial yang dibangun melalui kerja bersama.



Gambar 1. Penanaman Pohon di Banyumas

Produksi dan pemanfaatan eco enzyme (gambar 2) merupakan inovasi yang berkembang terutama di Jambi dan Bandung sebagai respons terhadap persoalan limbah organik rumah tangga. Eco enzyme diproduksi melalui fermentasi limbah buah dan sayuran, kemudian digunakan sebagai cairan pembersih alami atau pupuk cair. Praktik ini sejalan dengan pendekatan *zero waste* dan ekonomi sirkular yang mendorong pemanfaatan kembali sumber daya untuk meminimalkan limbah (Kirchherr et al., 2017). Dalam konteks pengabdian masyarakat, produksi eco enzyme memiliki implikasi lebih luas daripada sekadar pengurangan sampah. Ia memperkuat kapasitas perempuan dalam mengelola limbah domestik secara mandiri dan kreatif. Aktivitas ini menggeser paradigma pengelolaan sampah dari sekadar membuang menjadi memanfaatkan. Selain itu, proses pembuatan eco enzyme yang dilakukan secara kolektif menciptakan ruang belajar bersama yang memperkuat relasi sosial antar peserta. Dengan demikian, output ini memperlihatkan integrasi antara pengetahuan teknis, pemberdayaan perempuan, dan penguatan solidaritas komunitas.



Gambar 2. Proses Pembuatan Eco Enzym di Bandung

Penerapan budikdamber (budidaya ikan dalam ember) menjadi output inovatif yang berkembang di Jakarta Timur sebagai solusi terhadap keterbatasan ruang dan kebutuhan ketahanan pangan urban. Budikdamber memungkinkan masyarakat memproduksi ikan konsumsi dalam skala rumah tangga dengan memanfaatkan ruang terbatas. Praktik ini relevan dengan literatur pertanian urban yang menunjukkan bahwa produksi pangan lokal berkontribusi pada peningkatan ketahanan pangan sekaligus memperkuat ketahanan komunitas terhadap krisis distribusi (Santo et al., 2016; Orsini et al., 2020). Dalam konteks Eco Bhinneka, budikdamber bukan hanya solusi ekologis, tetapi juga media kolaborasi lintas iman. Peserta dari berbagai latar

agama bekerja sama dalam praktik budidaya, berbagi pengalaman, dan mendiskusikan potensi pengembangan lebih lanjut. Aktivitas ini menunjukkan bahwa inovasi sederhana dapat menjadi titik temu antara kebutuhan ekologis dan solidaritas sosial.

Selain output berbasis praktik langsung, kampanye digital lingkungan dan keberagaman menjadi capaian penting yang memperluas jangkauan dampak program. Peserta memanfaatkan media sosial untuk membagikan praktik pengelolaan sampah, kegiatan penghijauan, serta pesan toleransi berbasis aksi lingkungan. Strategi ini tidak hanya memperkuat identitas kolektif sebagai agen perubahan sosial-ekologis, tetapi juga membangun narasi publik tentang pentingnya kolaborasi lintas iman dalam menjaga lingkungan. Dalam era digital, kampanye berbasis komunitas terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik (Theocharis et al., 2015). Dengan demikian, output kampanye digital memperlihatkan integrasi antara aksi lokal dan advokasi publik yang lebih luas.

Output program Eco Bhinneka memperlihatkan pola transformasi yang konsisten: dari peningkatan pengetahuan menuju aksi nyata yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini membuktikan bahwa pengabdian masyarakat berbasis partisipasi dan nilai spiritual dapat menghasilkan perubahan yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Transformasi ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses pembelajaran, refleksi, dan praktik bersama. Hal ini menguatkan temuan bahwa pendekatan partisipatif dalam pengabdian mampu menghasilkan perubahan nyata ketika komunitas terlibat aktif dalam proses implementasi dan memiliki ruang untuk mengadaptasi program sesuai konteks lokal (Reed et al., 2018). Dengan demikian, output program ini tidak dapat dipahami semata-mata sebagai daftar kegiatan atau capaian kuantitatif, melainkan sebagai proses transformasi sosial-ekologis yang mengintegrasikan pengetahuan, praktik, solidaritas lintas iman, dan pemberdayaan perempuan muda. Program ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat dapat menjadi ruang strategis untuk menjembatani edukasi dan aksi, serta menghubungkan keberlanjutan ekologis dengan kohesi sosial secara simultan.

Outcome dan dampak program: Perubahan pengetahuan, perilaku, dan relasi sosial

Outcome dan dampak Program Eco Bhinneka dapat dipahami sebagai proses bertahap yang bergerak dari peningkatan kapasitas individual menuju penguatan kapasitas kolektif komunitas, lalu berkembang menjadi perubahan pada tingkat relasi sosial lintas kelompok. Dalam kerangka evaluasi program pengabdian, outcome merujuk pada perubahan yang relatif segera dan terukur setelah intervensi misalnya perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan sedangkan dampak menunjuk pada perubahan yang lebih luas, lebih berjangka, dan berhubungan dengan transformasi praktik, institusionalisasi kebiasaan baru, serta perubahan relasi sosial (Rossi et al., 2019). Hasil pengabdian Eco Bhinneka menunjukkan bahwa program tidak hanya menghasilkan output tindakan, tetapi juga memicu perubahan pada cara peserta memaknai lingkungan, mempraktikkan perilaku ekologis, dan membangun kerja sama lintas iman sebagai strategi kolektif untuk merawat bumi.

Pada tingkat individual, data pre-test dan post-test serta refleksi peserta menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran ekologis. Peningkatan tersebut tidak sekadar bersifat informasional, melainkan tampak berkaitan dengan kemampuan peserta menghubungkan isu lingkungan dengan problem sehari-hari. Misalnya, peserta mulai melihat sampah tidak hanya sebagai “urusan kebersihan,” tetapi sebagai persoalan sistemik yang berkaitan dengan pola konsumsi, pengelolaan rumah tangga, hingga kesehatan keluarga. Dalam literatur pendidikan lingkungan, perubahan semacam ini dipahami sebagai pergeseran dari *awareness* menuju *environmental literacy* yang mencakup pemahaman, sikap, keterampilan, dan kecenderungan untuk bertindak (Ardoin et al., 2020). Penguatan literasi ini menjadi penting karena penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan yang disertai keterampilan dan pengalaman praktik lebih

berpeluang menghasilkan perubahan perilaku dibanding pengetahuan yang berdiri sendiri (Wals, 2015; Ardoin et al., 2020).

Lebih jauh, perubahan yang terjadi pada peserta menunjukkan karakter pembelajaran transformatif. Dalam teori *transformative learning*, perubahan yang bermakna terjadi ketika individu mengalami refleksi kritis menguji asumsi lama lalu membangun cara pandang baru yang mendorong tindakan (Mezirow, 2018). Eco Bhinneka memperlihatkan mekanisme ini melalui pengalaman peserta yang awalnya ragu atau tidak yakin bahwa tindakan sederhana seperti memilah sampah, membuat eco enzyme, atau budikdamber dapat berdampak. Setelah melalui praktik bersama, diskusi reflektif, dan melihat hasil nyata, peserta menunjukkan peningkatan *self-efficacy* yaitu keyakinan bahwa mereka mampu melakukan aksi ekologis secara konsisten (Bandura, 1997). Dalam psikologi lingkungan, *self-efficacy* dipandang sebagai prediktor penting perilaku pro-lingkungan karena individu cenderung bertindak ketika merasa tindakannya bermakna dan mungkin dilakukan (Bamberg & Möser, 2007; Steg & Vlek, 2009). Temuan program ini sejalan dengan kerangka tersebut: ketika peserta memperoleh keterampilan praktis dan dukungan sosial, tindakan ekologis menjadi lebih mungkin dipertahankan sebagai kebiasaan.

Pada tingkat perilaku, outcome yang menonjol adalah perubahan praktik ekologis yang dapat diamati melalui implementasi RTL dan replikasi kegiatan di komunitas. Perubahan perilaku pro-lingkungan umumnya dipengaruhi kombinasi faktor: norma sosial, nilai, pengetahuan, dan kemudahan infrastruktur atau dukungan konteks (Steg & Vlek, 2009). Eco Bhinneka mendorong perubahan perilaku bukan hanya dengan mengajarkan “apa yang benar” secara normatif, melainkan dengan menciptakan ekosistem sosial yang mendukung. Misalnya, ketika bank sampah dibangun sebagai ruang komunitas, maka perilaku memilah sampah tidak lagi dianggap “repot,” tetapi menjadi praktik sosial yang mempunyai makna bersama dan bahkan bernilai ekonomi. Ketika eco enzyme dipraktikkan kolektif, tindakan mengolah sampah organik menjadi cairan berguna menjadi kebiasaan baru yang didukung oleh kelompok, bukan semata keputusan individual. Proses ini menunjukkan pentingnya aspek norma sosial dan dukungan komunitas dalam membentuk praktik ekologis yang konsisten (Bamberg & Möser, 2007).

Eco Bhinneka juga memperlihatkan penguatan kohesi sosial lintas iman melalui aktivasi “tujuan bersama” yang konkret. Di banyak konteks multireligius, relasi antar kelompok sering bersifat formal dan seremonial: ada toleransi pasif, tetapi minim kerja sama praktis. Program ini mengubah pola tersebut menjadi toleransi aktif yaitu kerja kolaboratif dalam isu yang menyentuh kebutuhan bersama. Secara teoretis, hal ini dapat dijelaskan melalui *contact theory* yang menekankan bahwa interaksi positif antar kelompok akan lebih efektif menurunkan prasangka ketika memenuhi syarat tertentu: status setara dalam aktivitas, tujuan bersama, kerja sama, dan dukungan norma/institusi (Pettigrew & Tropp, 2006). Eco Bhinneka memenuhi sebagian besar kondisi tersebut karena peserta lintas iman ditempatkan sebagai rekan kerja dalam aksi lingkungan, bukan sebagai pihak yang “dikunjungi” atau “ditoleransi” secara sepihak (Hasanah, 2024; Setiawan et al, 2022). Dengan bekerja bersama dalam kegiatan bank sampah, penghijauan, budikdamber, dan kampanye digital, mereka membangun pengalaman emosional bersama yang memperkuat rasa saling percaya. Dampaknya terlihat dalam munculnya keterbukaan komunikasi, peningkatan kenyamanan berinteraksi, dan tumbuhnya persepsi bahwa kolaborasi lintas iman tidak hanya mungkin, tetapi juga bermanfaat.

Temuan ini juga sejalan dengan literatur *environmental peacebuilding* yang menegaskan bahwa kerja sama pengelolaan sumber daya alam dapat menjadi medium membangun perdamaian sosial dan mengurangi potensi konflik identitas, khususnya ketika lingkungan dipahami sebagai kepentingan bersama (Ide, 2019). Program Eco Bhinneka memperlihatkan “jalan tengah” yang penting: lingkungan tidak diposisikan sebagai isu netral yang menghapus identitas, melainkan sebagai ruang di mana identitas dapat hadir tanpa menjadi sumber pembatas. Dengan demikian,

kolaborasi lintas iman yang lahir bukanlah homogenisasi, tetapi kooperasi yang menghormati perbedaan. Dalam masyarakat Indonesia yang plural, pola seperti ini memiliki nilai strategis karena memperkuat modal sosial lintas kelompok sekaligus memperluas daya jangkau gerakan lingkungan (Putnam, 2007).

Dari perspektif gender, dampak yang paling menonjol adalah penguatan posisi perempuan muda khususnya kader Nasyiatul Aisyiyah sebagai agen perubahan sosial-ekologis. Eco Bhinneka tidak hanya melibatkan perempuan sebagai “peserta,” melainkan memberi ruang bagi perempuan muda untuk menjadi fasilitator, penggerak komunitas, dan penghubung lintas kelompok. Dalam kerangka pemberdayaan, perubahan ini menunjukkan pergeseran dari partisipasi simbolik menuju partisipasi bermakna, yakni ketika perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan, memimpin proses, dan memengaruhi arah aksi kolektif (Cornwall, 2016). Di tingkat praktis, perempuan muda memegang peran sentral dalam mengorganisasi kegiatan, mengomunikasikan gagasan, membangun jejaring, dan memelihara keberlanjutan RTL. Peran tersebut penting karena menunjukkan bahwa program lingkungan tidak harus didominasi aktor formal atau maskulin, tetapi dapat tumbuh dari kepemimpinan perempuan yang berbasis kepedulian dan kerja perawatan.

Secara teoretis, temuan ini dapat dibaca melalui lensa ekofeminisme dan *care ethics*. Ekofeminisme menyoroti keterkaitan antara dominasi terhadap alam dan subordinasi terhadap perempuan, serta menekankan pentingnya mengakui pengetahuan dan pengalaman perempuan sebagai sumber daya perubahan ekologis (Gaard, 2015; Resurrección, 2017). Dalam banyak komunitas, perempuan berada di garis depan dampak krisis lingkungan mulai dari mengelola air, pangan, kesehatan keluarga, hingga kebersihan rumah namun kontribusi mereka sering tidak terlihat dalam kebijakan atau struktur pengambilan keputusan (UN Women, 2020). Eco Bhinneka memecah pola invisibilitas ini dengan menempatkan perempuan muda sebagai aktor utama dan memvalidasi praktik perawatan (mengelola sampah, merawat tanaman, merawat pangan keluarga) sebagai praktik politik ekologis yakni tindakan yang menjaga keberlanjutan kehidupan. *Care ethics* menegaskan bahwa kepedulian bukan sekadar emosi privat, tetapi etika sosial yang membentuk tanggung jawab kolektif terhadap kehidupan (Held, 2006; Tronto, 2013). Ketika perempuan muda memimpin aksi, mereka membawa logika perawatan ke ruang publik dan mengubahnya menjadi strategi komunitas (Siegel, 2024).

Dampak lain yang penting adalah terciptanya “infrastruktur sosial” untuk keberlanjutan program. Infrastruktur sosial tidak selalu berbentuk organisasi formal; ia dapat berupa jejaring terutama dari kelompok lintas iman dan agama, norma bersama, kebiasaan kolektif, dan kanal komunikasi yang memungkinkan aksi berlanjut setelah program selesai. Eco Bhinneka membangun infrastruktur ini melalui ToT (sebagai penguatan kapasitas kader), RTL (sebagai komitmen aksi), serta kampanye digital (sebagai ruang identitas kolektif dan dokumentasi publik). Dalam literatur pengabdian masyarakat, keberlanjutan program sering kali bergantung pada kemampuan komunitas membangun mekanisme internal untuk melanjutkan aksi, bukan pada intensitas pendampingan eksternal semata (Banks et al., 2017). Ketika kader mampu mereplikasi pelatihan, mengorganisasi aksi, dan menggerakkan partisipasi lintas iman, maka program memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan berkembang.

Secara keseluruhan, outcome dan dampak Program Eco Bhinneka memperlihatkan tiga lapis perubahan yang saling menguatkan: perubahan kognitif-afektif (pengetahuan, kesadaran, dan *self-efficacy*), perubahan praktik (aksi nyata dan keberlanjutan RTL), serta perubahan relasi sosial (kohesi lintas iman dan kepemimpinan perempuan muda). Ketiga lapis ini menunjukkan bahwa program tidak hanya memecahkan masalah teknis lingkungan, tetapi juga membangun kapasitas sosial untuk merawat bumi secara kolektif. Dalam konteks Indonesia yang menghadapi tantangan ekologis dan sosial secara simultan, temuan ini mengindikasikan bahwa model

pengabdian berbasis kolaborasi lintas iman yang dipimpin perempuan muda memiliki potensi sebagai praktik baik yang dapat direplikasi dan dimodifikasi sesuai konteks lokal. Dengan kata lain, Eco Bhinneka menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan bukan hanya soal teknologi dan kebijakan, tetapi juga soal membangun komunitas yang mampu bekerja sama melampaui batas identitas demi tujuan bersama.

Temuan dalam program Eco Bhinneka menunjukkan bahwa perubahan ekologis dan penguatan kohesi sosial tidak terjadi secara terpisah, melainkan melalui proses yang saling terkait antara pembelajaran, nilai spiritual, aksi kolektif, dan kepemimpinan perempuan muda (Setiawan et al, 2022). Untuk memahami dinamika ini secara lebih mendalam, diperlukan sintesis konseptual yang mengintegrasikan empat kerangka teoretis utama: *environmental peacebuilding*, *faith-based environmentalism*, *transformative learning*, dan ekofeminisme. Integrasi keempat perspektif ini membantu menjelaskan mengapa dan bagaimana program berbasis kolaborasi lintas iman mampu menghasilkan dampak ekologis sekaligus sosial (Kemper et al, 2025).

Pertama, dalam kerangka *environmental peacebuilding*, kerja sama dalam pengelolaan sumber daya alam dipahami sebagai medium potensial untuk membangun perdamaian dan memperkuat kohesi sosial, khususnya dalam konteks masyarakat yang plural atau rentan konflik (Ide, 2019; Carius, 2017). Teori ini berangkat dari asumsi bahwa lingkungan merupakan kepentingan bersama (*shared interest*) yang melampaui batas identitas politik, etnis, atau agama. Ketika kelompok yang berbeda bekerja sama dalam tujuan ekologis, mereka membangun pengalaman interaksi positif yang dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan kepercayaan (Geiger et al, 2020). Eco Bhinneka memperlihatkan dinamika tersebut dalam konteks komunitas multireligius di Indonesia. Aksi lingkungan seperti pengelolaan bank sampah, penanaman pohon, dan budidkamber menciptakan ruang kolaborasi yang bersifat praktis dan setara. Dalam ruang tersebut, identitas agama tidak dihapuskan, tetapi ditempatkan dalam relasi kooperatif yang berorientasi pada tujuan bersama. Dengan demikian, lingkungan berfungsi sebagai “ruang netral yang produktif,” yakni arena di mana perbedaan dapat dinegosiasikan melalui kerja kolektif.

Namun, Eco Bhinneka tidak hanya mengandalkan logika kerja sama pragmatis. Program ini juga berakar pada dimensi nilai dan spiritualitas, yang dapat dijelaskan melalui kerangka *faith-based environmentalism*. Literatur menunjukkan bahwa organisasi dan komunitas keagamaan memiliki modal moral, legitimasi sosial, dan jaringan komunitas yang kuat untuk mendorong perubahan perilaku ekologis (Mangunjaya & McKay, 2019; Taylor et al., 2016). Nilai-nilai spiritual memberikan kerangka etis yang memperkuat motivasi intrinsik individu untuk bertindak, melampaui sekadar kepentingan instrumental (Husni et al, 2025). Dalam Eco Bhinneka, konsep amanah menjaga bumi, tanggung jawab sebagai khalifah, serta nilai kasih dan kepedulian dalam tradisi agama lain menjadi dasar normatif bagi aksi ekologis. Hal ini memperlihatkan bahwa spiritualitas tidak diposisikan sebagai simbol retorik, tetapi sebagai sumber energi moral yang menggerakkan tindakan. Sintesis antara aksi lingkungan dan nilai agama menciptakan bentuk *moral ecology*, di mana tindakan ekologis dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual.

Integrasi antara *environmental peacebuilding* dan *faith-based environmentalism* dalam Eco Bhinneka memperlihatkan bahwa kolaborasi lintas iman berbasis aksi ekologis bukan hanya strategi teknis, tetapi strategi normatif yang menghubungkan kepentingan bersama dengan nilai bersama (Hasanah, 2024). Dengan kata lain, kerja sama tidak hanya didorong oleh kebutuhan praktis, tetapi juga oleh keyakinan moral bahwa menjaga bumi adalah panggilan bersama. Kombinasi ini memperkuat keberlanjutan aksi karena didukung oleh dimensi rasional dan emosional sekaligus.

Untuk memahami perubahan pada tingkat individu, kerangka *transformative learning* menjadi relevan. Mezirow (2018) menegaskan bahwa pembelajaran transformatif terjadi ketika individu mengalami refleksi kritis terhadap asumsi lama dan membangun perspektif baru yang

lebih inklusif dan reflektif. Dalam program Eco Bhinneka, peserta tidak hanya memperoleh informasi baru, tetapi mengalami proses refleksi melalui praktik langsung dan dialog lintas iman. Pengalaman bekerja bersama individu dari latar belakang agama berbeda dalam aksi lingkungan memicu proses refleksi terhadap stereotip atau asumsi lama. Proses ini menghasilkan pergeseran perspektif: dari melihat perbedaan sebagai batas menjadi melihatnya sebagai kekayaan kolaboratif. Selain itu, praktik ekologis yang dilakukan bersama memperkuat *self-efficacy* dan rasa kebermaknaan tindakan. Dengan demikian, transformasi yang terjadi bersifat kognitif, afektif, dan sosial.

Transformasi ini semakin bermakna ketika dilihat melalui perspektif ekofeminisme. Ekofeminisme menyoroti keterkaitan antara dominasi terhadap alam dan subordinasi terhadap perempuan, serta menekankan pentingnya mengakui pengalaman perempuan sebagai sumber pengetahuan ekologis (Gaard, 2015; Resurrección, 2017). Dalam banyak konteks, perempuan memikul tanggung jawab pengelolaan sumber daya domestik air, pangan, kebersihan yang menjadikan mereka aktor sentral dalam praktik keberlanjutan sehari-hari. Namun, peran tersebut seringkali tidak diakui sebagai kepemimpinan publik. Eco Bhinneka menggeser pola ini dengan memberi ruang bagi perempuan muda untuk memimpin aksi lingkungan dan menjadi fasilitator dialog lintas iman. Perempuan tidak hanya menjadi pelaksana, tetapi juga perancang dan penghubung sosial.

Perspektif *care ethics* memperdalam analisis ini. Etika kepedulian menekankan bahwa praktik merawat bukan sekadar tindakan privat, melainkan praktik moral dan politik yang menjaga keberlanjutan kehidupan (Puig de la Bellacasa, 2017; Tronto, 2013). Dalam Eco Bhinneka, praktik seperti mengelola sampah, merawat tanaman, dan membudidayakan ikan dipahami sebagai tindakan kolektif yang memiliki dimensi sosial dan ekologis. Ketika perempuan muda memimpin praktik ini di ruang publik, mereka mentransformasikan etika perawatan menjadi strategi perubahan sosial. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberdayakan perempuan secara instrumental, tetapi juga merekonstruksi makna kepemimpinan ekologis sebagai praktik berbasis kepedulian.

Sintesis keempat kerangka tersebut menunjukkan bahwa Eco Bhinneka beroperasi pada beberapa lapis sekaligus. Pada lapis normatif, program ini memanfaatkan nilai spiritual sebagai landasan moral aksi ekologis (*faith-based environmentalism*). Pada lapis sosial, program ini membangun kerja sama lintas iman melalui tujuan ekologis bersama (*environmental peacebuilding*). Pada lapis individual, program ini memfasilitasi perubahan perspektif melalui pengalaman dan refleksi (*transformative learning*). Pada lapis gender, program ini mereposisi perempuan muda sebagai agen perubahan melalui praktik kepedulian yang dipublikasikan (*ekofeminisme dan care ethics*). Keempat lapis ini saling memperkuat dan menjelaskan mengapa dampak program tidak hanya terlihat pada perubahan perilaku ekologis, tetapi juga pada penguatan kohesi sosial dan kepemimpinan perempuan. Eco Bhinneka dapat dipahami sebagai model integratif pengabdian masyarakat yang menggabungkan dimensi ekologis, sosial, spiritual, dan gender dalam satu kerangka praksis. Model ini menunjukkan bahwa keberlanjutan lingkungan dan perdamaian sosial bukanlah agenda yang terpisah, melainkan saling terkait dan dapat diperkuat melalui pendekatan partisipatif yang sensitif terhadap nilai dan konteks lokal. Dalam konteks masyarakat multireligius dan menghadapi krisis ekologis, sintesis konseptual ini menawarkan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan model pengabdian masyarakat yang lebih holistik dan transformatif.

Tantangan dan pembelajaran: Adaptasi, kapasitas, dan keberlanjutan

Meskipun program Eco Bhinneka menunjukkan dampak positif dalam aspek ekologis dan sosial, pelaksanaannya tidak terlepas dari berbagai tantangan struktural dan kontekstual. Tantangan pertama yang signifikan adalah keterbatasan pendanaan dan sumber daya. Dalam beberapa

wilayah, dukungan finansial yang terbatas membatasi jangkauan kegiatan, terutama dalam aspek logistik, distribusi alat praktik, dan perluasan masifikasi program. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan program berbasis komunitas sangat bergantung pada kapasitas mobilisasi sumber daya lokal serta jejaring kemitraan yang kuat. Dalam literatur pengabdian masyarakat partisipatif, ketergantungan pada pendanaan eksternal sering menjadi hambatan keberlanjutan apabila tidak disertai strategi penguatan kapasitas internal komunitas (Banks et al., 2017). Namun, dalam konteks Eco Bhinneka, keterbatasan tersebut justru mendorong inovasi misalnya pemanfaatan sumber daya lokal, penggunaan bahan daur ulang untuk praktik, serta penguatan solidaritas antar kader untuk berbagi peran.

Tantangan kedua berkaitan dengan variasi kapasitas kader di setiap wilayah. Perbedaan latar belakang pendidikan, pengalaman organisasi, dan tingkat literasi lingkungan menyebabkan proses adaptasi program berjalan dengan dinamika yang berbeda-beda. Di beberapa wilayah, fasilitator membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami modul dan menerjemahkannya ke dalam praktik yang kontekstual. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan berkelanjutan melalui ToT dan pendampingan reflektif. Literatur tentang pemberdayaan komunitas menegaskan bahwa kapasitas individu dan kelembagaan merupakan prasyarat bagi keberlanjutan perubahan sosial (Chambers, 2017). Eco Bhinneka memberikan pembelajaran bahwa pelatihan awal perlu dilengkapi dengan mekanisme umpan balik dan ruang refleksi berkala agar kualitas implementasi tetap terjaga.

Tantangan ketiga adalah rendahnya literasi lingkungan pada tahap awal, terutama di wilayah yang belum memiliki tradisi pengelolaan sampah atau aksi ekologis kolektif. Rendahnya literasi ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya informasi, tetapi juga dengan belum terbentuknya norma sosial yang mendukung perilaku pro-lingkungan. Dalam kerangka teori perilaku pro-lingkungan, norma sosial memiliki pengaruh signifikan terhadap konsistensi tindakan individu (Steg & Vlek, 2009). Oleh karena itu, Eco Bhinneka tidak hanya memberikan edukasi, tetapi juga membangun norma kolektif melalui aksi bersama. Pembelajaran penting dari pengalaman ini adalah bahwa perubahan perilaku ekologis memerlukan strategi bertahap: peningkatan pengetahuan, pengalaman praktik, dukungan sosial, dan internalisasi nilai.

Pelajaran utama yang dapat ditarik adalah pentingnya pendekatan adaptif dan kontekstual. Program yang efektif bukanlah program yang seragam, melainkan program yang mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik sosial dan ekologis masing-masing wilayah. Fleksibilitas dalam implementasi, keterbukaan terhadap refleksi, serta kemauan untuk belajar dari dinamika lapangan menjadi kunci keberhasilan. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi tidak menjadi hambatan permanen, melainkan ruang pembelajaran kolektif yang memperkuat kapasitas komunitas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Eco Bhinneka merupakan model pengabdian masyarakat yang efektif dalam mengintegrasikan edukasi dan aksi lingkungan melalui kolaborasi lintas iman. Program ini menunjukkan bahwa peningkatan literasi ekologis dapat berjalan seiring dengan penguatan kohesi sosial apabila dirancang melalui pendekatan partisipatif dan berbasis nilai. Transformasi yang terjadi tampak pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran ekologis pada tingkat individu, perubahan perilaku ramah lingkungan pada tingkat komunitas, serta penguatan relasi sosial lintas iman yang berkontribusi pada kohesi dan perdamaian sosial. Selain itu, Eco Bhinneka juga memperkuat posisi perempuan muda sebagai agen perubahan sosial-ekologis, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai fasilitator, penggerak, dan penghubung antar kelompok. Artikel ini memberikan kontribusi teoretis dengan mengintegrasikan *environmental peacebuilding*, *faith-based environmentalism*,

transformative learning, dan ekofeminisme ke dalam satu model praksis pengabdian masyarakat. Melalui pendekatan ini, artikel memperlihatkan bahwa kerja sama ekologis di tingkat komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk membangun kohesi sosial lintas iman, menerjemahkan nilai spiritual ke dalam aksi ekologis yang partisipatif, mendorong perubahan perspektif dan perilaku melalui pembelajaran transformatif, serta menegaskan peran perempuan muda dalam kepemimpinan ekologis berbasis kepedulian.

Meskipun demikian, program ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Variasi kapasitas kader dan mitra lokal menyebabkan kualitas implementasi belum sepenuhnya seragam di setiap wilayah. Keterbatasan pendanaan dan sumber daya teknis juga memengaruhi intensitas pendampingan, skala kegiatan, dan penyediaan sarana praktik. Di samping itu, durasi pelaksanaan yang relatif singkat membuat sebagian dampak jangka panjang, terutama terkait keberlanjutan perubahan perilaku dan institusionalisasi kolaborasi lintas iman, belum dapat diamati secara mendalam. Dokumentasi dan data monitoring antarwilayah juga belum sepenuhnya homogen, sehingga sebagian outcome lebih kuat dibaca secara kualitatif. Dari sisi strategis, replikasi model Eco Bhinneka di wilayah lain perlu tetap mempertahankan prinsip partisipatif dan kontekstual, bukan sekadar menyalin bentuk kegiatan. Penguatan kapasitas kader melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan reflektif, dan monitoring yang lebih terstandar perlu menjadi prioritas. Kolaborasi dengan lembaga keagamaan, institusi pendidikan, pemerintah lokal, dan forum lintas iman juga perlu diperkuat agar keberlanjutan kohesi sosial dan aksi ekologis tetap terjaga. Secara keseluruhan, Eco Bhinneka menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat dapat menjadi ruang strategis untuk menjawab krisis ekologis sekaligus memperkuat perdamaian sosial, dengan menempatkan relasi sosial, nilai spiritual, dan kepemimpinan perempuan muda sebagai fondasi utama perubahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Pusat Nasyyiatul Aisyiyah, mitra komunitas lintas iman, Lazismu, serta seluruh kader dan masyarakat di wilayah dampingan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program Eco Bhinneka.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., Ameen, B. M. M., & Khedhir, R. M. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 6, 100198. <https://doi.org/10.1016/j.gmedi.2025.100198>
- Ardoin, N. M., Bowers, A. W., & Gaillard, E. (2020). Environmental education outcomes for conservation: A systematic review. *Biological Conservation*, 241, 108224. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.108224>
- Bamberg, S., & Möser, G. (2007). Twenty years after Hines et al.: A meta-analysis of psychosocial determinants of pro-environmental behaviour. *Journal of Environmental Psychology*, 27(1), 14–25. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2006.12.002>
- Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control*. Freeman.
- Banks, S., Hart, A., Pahl, K., & Ward, P. (2017). Co-producing research: A community development approach. *Community Development Journal*, 52(2), 191–207. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsw059>
- Bappenas. (2020). *Outlook pembangunan lingkungan hidup Indonesia*. Kementerian PPN/Bappenas.

-
- Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health*, 11(4), 589–597. <https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806>
- Carius, A. (2017). Environmental peacebuilding: Conditions for success. *International Affairs*, 93(3), 601–620. <https://doi.org/10.1093/ia/iix016>
- Chambers, R. (2017). *Can we know better? Reflections for development*. Practical Action Publishing.
- Cornwall, A. (2016). Women’s empowerment: What works? *Journal of International Development*, 28(3), 342–359. <https://doi.org/10.1002/jid.3210>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage.
- Dhokhikah, Y., Trihadiningrum, Y., & Sunaryo, S. (2015). Community participation in household solid waste reduction in Surabaya, Indonesia. *Resources, Conservation and Recycling*, 102, 153–162. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.06.013>
- Fischer, A., et al. (2017). Environmental stewardship in urban areas. *Conservation Letters*, 10(5), 505–512. <https://doi.org/10.1111/conl.12347>
- Gaard, G. (2015). Ecofeminism and climate change. *Women’s Studies International Forum*, 49, 20–33. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2015.02.004>
- Geiger, S. M., Geiger, M., & Wilhelm, O. (2020). How does environmental knowledge translate into pro-environmental behaviors? The mediating role of environmental attitudes and behavioral intentions. *Science of the Total Environment*, 728, 138126. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.138126>
- Hasanah, U. (2024). The role of the young women’s organization Nasyiatul Aisyiyah in Indonesia in interfaith collaborative action through environmental approaches. *The International Journal for Religious Freedom*, 17(2). <https://doi.org/10.59484/WLMZ4241>
- Hachmann, S., Löhr, K., Morales-Muñoz, H., Eufemia, L., Sieber, S., & Bonatti, M. (2023). Conceptualizing community-based environmental peacebuilding in Cesar, Colombia. *Human Ecology*, 51, 221–235. <https://doi.org/10.1007/s10745-023-00399-9>
- Held, V. (2006). *The ethics of care: Personal, political, and global*. Oxford University Press.
- Husni, Wren, O. B., Nurteti, L., Daud, M. A. B., & Selamet. (2025). Islamic religious education in the era of environmental crisis: Interfaith, interdisciplinary, and interplanetary perspectives. *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 23(2). <https://doi.org/10.21154/cendekia.v23i2.11533>
- Ide, T. (2019). The impact of environmental cooperation on peacemaking. *International Environmental Agreements*, 19(3), 1–18. <https://doi.org/10.1007/s10784-019-09433-6>
- IPCC. (2023). *Climate change 2023: Synthesis report*. Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Jagosh, J., Bush, P., Salsberg, J., et al. (2015). A realist evaluation of community-based participatory research. *The Milbank Quarterly*, 93(2), 318–348. <https://doi.org/10.1111/1468-0009.12110>
- Kemper, J. A., Ballantine, P. W., Hall, C. M., & Axelsen, M. (2025). Toward behavioral learning outcomes: A case study of an experiential learning approach and students’ self-reported facilitators and barriers for pro-environmental behavior. *International Journal of*
-

- Sustainability in Higher Education*, 26(9), 265–280. <https://doi.org/10.1108/IJSHE-01-2025-0063>
- Kirchherr, J., Reike, D., & Hekkert, M. (2017). Conceptualizing the circular economy. *Resources, Conservation and Recycling*, 127, 221–232. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005>
- KLHK. (2022). *Statistik lingkungan hidup Indonesia*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
- Kolb, D. A. (2015). *Experiential learning: Experience as the source of learning and development* (2nd ed.). Pearson.
- Krampe, F., Hegazi, F., & VanDeveer, S. D. (2021). Sustaining peace through better resource governance: Three potential mechanisms for environmental peacebuilding. *World Development*, 144, 105508. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105508>
- Krueger, R. A., & Casey, M. A. (2015). *Focus groups: A practical guide for applied research* (5th ed.). Sage.
- Mangunjaya, F. M., & McKay, J. E. (2019). Religion and conservation: New perspectives on faith-based environmentalism in Indonesia. *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture*, 13(1), 45–65. <https://doi.org/10.1558/jsrnc.38408>
- Mezirow, J. (2018). *Transformative learning theory*. In K. Illeris (Ed.), *Contemporary theories of learning* (pp. 114–128). Routledge.
- Muzakki, H., Arif, M., & Mamah. (2025). Integration of Islamic education values and *fiqh al-bi'ah* in cultivating environmentally responsible character. *Cendekia: Jurnal Kependidikan dan Kemasyarakatan*, 23(1). <https://doi.org/10.21154/cendekia.v23i1.10272>
- Orsini, F., et al. (2020). Urban agriculture in the Global North and South: A review. *Agronomy for Sustainable Development*, 40(2), 1–15. <https://doi.org/10.1007/s13593-020-00615-6>
- Paluck, E. L., Green, S. A., & Green, D. P. (2019). The contact hypothesis re-evaluated. *Annual Review of Psychology*, 70, 339–367. <https://doi.org/10.1146/annurev-psych-010418-102832>
- Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, 90(5), 751–783. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751>
- Pretty, J., & Smith, D. (2004). Social capital in biodiversity conservation and management. *Conservation Biology*, 18(3), 631–638.
- Puig de la Bellacasa, M. (2017). *Matters of care: Speculative ethics in more than human worlds*. University of Minnesota Press.
- Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum: Diversity and community in the twenty-first century. *Scandinavian Political Studies*, 30(2), 137–174.
- Reed, M. S., et al. (2018). Participatory methods for sustainability science. *Sustainability Science*, 13(6), 1559–1572. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0560-1>
- Resurrección, B. P. (2017). Gender and environment. *Gender, Place & Culture*, 24(1), 1–15. <https://doi.org/10.1080/0966369X.2016.1270387>
-

- Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Freeman, H. E. (2019). *Evaluation: A systematic approach* (8th ed.). Sage.
- Santo, R., Palmer, A., & Kim, B. (2016). Vacant lots to vibrant plots: A review of urban agriculture. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 6(1), 1–22.
- Setiawan, H., Kurniawan, N. I., & Santoso, P. (2022). The ecotheological movement of the Muhammadiyah Environmental Council in response to the environmental governance crisis. *Millah: Journal of Religious Studies*, 21(3), 639–670. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art2>
- Siegel, L. (2024). Ecofeminism ↔ intraconnectivism: Working beyond binaries in environmental education. *Gender and Education*, 36(4), 328–344. <https://doi.org/10.1080/09540253.2024.2327429>
- Steg, L., & Vlek, C. (2009). Encouraging pro-environmental behaviour. *Journal of Environmental Psychology*, 29(3), 309–317. <https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.10.004>
- Taylor, B., Van Wieren, G., & Zaleha, B. (2016). The greening of religion hypothesis. *Journal for the Study of Religion, Nature and Culture*, 10(3), 268–305.
- Theocharis, Y., Lowe, W., van Deth, J., & García-Albacete, G. (2015). Using social media for collective action. *Information, Communication & Society*, 18(2), 202–220.
- Tomalin, E. (2015). Religion and sustainable development. *World Development*, 68, 63–75. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.11.005>
- Tronto, J. C. (2013). *Caring democracy: Markets, equality, and justice*. NYU Press.
- UN Women. (2020). *Gender equality and climate change*. United Nations.
- Wals, A. E. J. (2015). Beyond unreasonable doubt: Education and learning for socio-ecological sustainability. *Journal of Education for Sustainable Development*, 9(1), 1–13.

Conflict of Interest Statement: The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2026 Author(s). This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License \(CC BY\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.